

ABSTRAK

Pasal 251 KUHD menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, selain itu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan yang disesuaikan dengan kebiasaan dan undang-undang, begitu pula dengan pelaksanaan perjanjian asuransi. Akan tetapi kerap terjadi pelanggaran terhadap asas itikad baik salah satunya terjadi pada produk *unit link* yang diberi nama *Saving Plan* milik Jiwasraya. Pelanggaran tersebut ditunjukkan dengan adanya penyampaian informasi yang keliru diantara para pihak, seperti produk *Saving Plan* yang disebut sama dengan deposito, yang akhirnya membuat Jiwasraya tidak sanggup membayar klaim investasi nasabah *Saving Plan* sebesar 12,4 Triliun. Untuk itu diperlukan pula perlindungan hukum bagi nasabah untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai konsumen pada sector jasa keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dan perlindungan hukum bagi nasabah JS *Saving Plan* menurut UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan asas itikad baik dalam penundaan pembayaran klaim investasi belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kepatutan dan keadilan oleh pihak Jiwasraya. Selain itu perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas karena belum adanya Lembaga Penjamin Polis atau LPP.

Kata kunci : Asuransi *unit link*, JS *Saving Plan*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Article 251 KUHD explains that the agreement must be carried out in good faith, in addition the agreement must be carried out in accordance with propriety and justice in accordance with custom and law, as well as the implementation of the insurance agreement. However, there is often a violation of the principle of good faith, one of which occurs in the unit link product named Jiwasraya's Saving Plan. The violation is shown by the misinformation of information between the parties, such as Saving Plan products which are called the same as deposits, which ultimately made Jiwasraya unable to pay the investment claims of Saving Plan customers amounting to 12.4 Trillion. For this reason, it is also necessary to provide legal protection for customers to reclaim their rights as consumers in the financial services sector. Therefore, this study aims to determine the application of the principles of good faith and legal protection for JS Saving Plan customers according to Insurance Law No. 40 of 2014. The method used in this study is normative juridical. Data collection techniques through library research, carried out by collecting secondary data. The research specifications used are descriptive analytical, which clearly describe the legal issues. The conclusion obtained in this study is the application of the principle of good faith in delaying the payment of investment claims has not been fully carried out in accordance with propriety and justice by the Jiwasraya. In addition, legal protection is still limited due to the absence of a Policy Guarantee Agency or LPP.

Keywords: Unit link insurance, JS Saving Plan, Legal Protection